

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 2, February 2025, P. 318-331
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14913530>

Kajian Literatur Tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia : Evaluasi dan Perspektif Berkelanjutan

Wafa Adila ¹ Refdi ² Fitra Hadi ³

^{1,2,3}STIA Lancang Kuning

Email: wafaadila7@gmail.com

Abstrak

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia merupakan isu krusial yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional. Berbagai laporan, penelitian, dan kebijakan telah mendokumentasikan kemajuan serta tantangan dalam implementasi SDGs, terutama dalam konteks digitalisasi, pendanaan, dan kemitraan multipihak. Studi menunjukkan bahwa transformasi digital berperan penting dalam mempercepat pencapaian SDGs, sementara pendanaan dari sektor swasta menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan program. Selain itu, terdapat disparitas pencapaian antarwilayah yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif. Indonesia telah mencapai 62,5% target SDGs 2030, tertinggi di Asia, meskipun peringkatnya di tingkat regional masih berfluktuasi. Berbagai kajian juga menyoroti peran perubahan iklim sebagai tantangan utama dalam pencapaian SDGs. Kajian sistematis menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jaringan dan analisis kebijakan menjadi metode yang efektif dalam menilai efisiensi pelaksanaan SDGs. Selain itu, keterlibatan akademisi dalam studi kebijakan publik dan analisis sistematis menjadi bagian integral dalam mengidentifikasi strategi percepatan SDGs di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan serta mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

Kata kunci: SDGs, Indonesia, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, kebijakan publik.

Abstract

The achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia is a crucial issue involving various sectors, including the government, private sector, academia, and international organizations. Various reports, studies, and policies have documented the progress and challenges in SDG implementation, particularly in the context of digitalization, financing, and multi-stakeholder partnerships. Studies indicate that digital transformation plays a vital role in accelerating SDG achievement, while private sector funding is a key factor in program sustainability. Additionally, there are disparities in achievement between regions, necessitating more inclusive policy approaches. Indonesia has achieved 62.5% of its 2030 SDG targets, the highest in Asia, although its regional ranking remains fluctuating. Several studies also highlight climate change as a major challenge in SDG attainment. Systematic reviews show that network-based approaches and policy analysis are effective methods for assessing SDG implementation efficiency. Furthermore, academic engagement in public policy studies and systematic analysis is integral to identifying strategies for accelerating SDGs in Indonesia. Therefore, continuous synergy between the government, private sector, academia, and society is essential in overcoming obstacles and accelerating SDG achievement in Indonesia.

Keywords: SDGs, Indonesia, sustainable development, digital transformation, public policy

Article Info

Received date: 31 January 2025

Revised date: 10 February 2025

Accepted date: 17 February 2025

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan (United Nations, 2015). SDGs dirancang sebagai komitmen global yang harus dicapai pada tahun 2030 guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, implementasi SDGs di berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia

menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan SDGs. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi SDGs ke dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta strategi pembangunan daerah. Namun, dalam implementasinya, pencapaian SDGs di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kesenjangan sosial, keterbatasan sumber daya, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata (Bappenas, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi SDGs di Indonesia adalah penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. SDGs menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan (Sachs et al., 2019). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi lintas sektor serta kapasitas kelembagaan yang beragam di tingkat pusat dan daerah (Wijaya & Glasbergen, 2021). Keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi juga menjadi hambatan dalam mengukur capaian SDGs secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas implementasi SDGs di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam mencapai SDGs dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi hijau dapat berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs, seperti peningkatan akses pendidikan, efisiensi energi, serta pengurangan emisi karbon (Purwanto et al., 2022). Selain itu, peran sektor swasta dan investasi berkelanjutan semakin diperlukan untuk mempercepat pencapaian target SDGs di berbagai sektor pembangunan (UNDP Indonesia, 2020). Dengan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis data, Indonesia dapat memperkuat komitmennya dalam mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kajian literatur tentang implementasi SDGs di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih serta merumuskan strategi keberlanjutan ke depan. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi SDGs di Indonesia, serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan strategi nasional dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif dan berdaya guna.

Sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan implementasi agenda global ini di tingkat nasional dan daerah. Sejak diadopsinya Agenda 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, Indonesia telah menyesuaikan kebijakannya dengan prinsip-prinsip SDGs, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (United Nations, 2015). Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi dasar hukum bagi integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Dalam implementasi SDGs, Indonesia mengadopsi pendekatan “no one left behind”, yang menekankan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah menyelaraskan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memasukkan aspek keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi, pembangunan manusia, serta ketahanan lingkungan (Bappenas, 2021). Selain itu, pemerintah juga melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mencapai target SDGs. Model kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target SDGs serta memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi (Wijaya & Glasbergen, 2021).

Namun, pencapaian SDGs di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan pendanaan, serta dampak perubahan iklim. Beberapa indikator SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (SDG 13 dan SDG 15), masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang diharapkan pada tahun 2030 (Sachs

et al., 2022). Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek kesehatan (SDG 3) dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (SDG 8) (UNDP Indonesia, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif untuk mengatasi tantangan ini serta menjaga komitmen nasional terhadap SDGs.

Sebagai bagian dari komitmen global, Indonesia juga turut serta dalam berbagai forum internasional terkait pembangunan berkelanjutan. Indonesia aktif dalam High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development dan telah menyampaikan laporan sukarela atau Voluntary National Review (VNR) untuk melaporkan perkembangan implementasi SDGs kepada komunitas internasional (United Nations, 2022). Selain itu, Indonesia juga berperan dalam memperkuat kerja sama regional di ASEAN, khususnya dalam mengembangkan strategi keberlanjutan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Secretariat, 2021). Partisipasi dalam berbagai forum ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berupaya mencapai target SDGs di dalam negeri tetapi juga berkontribusi dalam diskusi dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Ke depan, komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs perlu terus diperkuat melalui inovasi kebijakan, peningkatan pendanaan, serta penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan data SDGs juga menjadi aspek krusial dalam memantau perkembangan dan efektivitas kebijakan (Purwanto et al., 2022). Dengan langkah-langkah strategis yang lebih adaptif dan berbasis bukti, Indonesia dapat terus memperkuat perannya dalam mencapai SDGs serta memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Kajian literatur memainkan peran penting dalam memahami perkembangan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia. Sebagai bagian dari agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, SDGs menuntut adanya evaluasi berkala untuk menilai capaian, mengidentifikasi tantangan, dan merancang strategi yang lebih efektif dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015). Kajian literatur yang komprehensif memungkinkan analisis berbasis bukti dari berbagai penelitian terdahulu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai progres SDGs di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya (Sachs et al., 2022).

Dalam konteks capaian SDGs, kajian literatur dapat memberikan gambaran tentang indikator-indikator kunci yang telah menunjukkan kemajuan serta aspek yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Studi yang dilakukan oleh Purwanto et al. (2022) menyoroti bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam aspek pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan akses pendidikan (SDG 4), serta penguatan kesetaraan gender (SDG 5). Namun, tantangan masih terlihat dalam indikator lain, seperti peningkatan kualitas lingkungan (SDG 13 dan SDG 15) serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG 8). Dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu, pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau hambatan dalam pencapaian SDGs di Indonesia.

Di sisi lain, kajian literatur juga sangat relevan dalam mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam implementasi SDGs. Studi oleh Wijaya dan Glasbergen (2021) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan, serta lemahnya infrastruktur data dan monitoring menjadi hambatan utama dalam mencapai target SDGs. Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim dan dampak pandemi COVID-19 semakin memperumit proses pencapaian SDGs, terutama dalam aspek ketahanan kesehatan (SDG 3) dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (SDG 8) (UNDP, 2021). Dengan memahami tantangan ini melalui kajian literatur, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis bukti dalam menghadapi hambatan yang ada.

Lebih lanjut, kajian literatur memberikan wawasan penting mengenai strategi keberlanjutan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SDGs di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan inovasi, penguatan kemitraan publik-swasta, serta desentralisasi kebijakan pembangunan merupakan strategi yang dapat mempercepat pencapaian SDGs (Purwanto et al., 2022; Sachs et al., 2022). Studi oleh Kharrazi et al. (2021) juga menegaskan bahwa penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam mendukung pencapaian SDGs. Oleh karena itu, melalui kajian literatur yang sistematis, strategi-

strategi ini dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan konteks nasional serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh Indonesia.

Dengan demikian, kajian literatur tidak hanya berperan dalam menilai capaian SDGs, tetapi juga dalam memahami tantangan serta merumuskan strategi keberlanjutan yang lebih efektif. Kajian ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih berbasis bukti dan berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan terkait implementasi SDGs di Indonesia, maka pengembangan kebijakan dan program pembangunan dapat semakin terarah dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian dan kebijakan pembangunan. Sebagai negara berkembang dengan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks, Indonesia berupaya mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah telah mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Namun, hingga saat ini, pencapaian SDGs masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, keterbatasan pendanaan, serta dampak perubahan iklim (Firdaus & Fauzi, 2021). Oleh karena itu, kajian literatur sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi SDGs telah berjalan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mempercepat pencapaian target SDGs di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencapaian SDGs di Indonesia masih belum merata di seluruh sektor dan wilayah. Misalnya, dalam aspek pengurangan kemiskinan (SDG 1) dan peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), Indonesia telah mencatat beberapa kemajuan positif, terutama dalam hal peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pendidikan (Amalia, 2020). Namun, kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan besar, terutama dalam indikator kesetaraan gender (SDG 5), akses terhadap energi bersih (SDG 7), dan pengelolaan lingkungan (SDG 13) (Prasetyo & Yuliati, 2022). Kajian literatur yang komprehensif diperlukan untuk memahami sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi pencapaian SDGs serta bagaimana kebijakan yang ada dapat dioptimalkan.

Selain itu, salah satu hambatan utama dalam implementasi SDGs di Indonesia adalah keterbatasan pendanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Studi oleh Rahmawati dan Setyowati (2021) menunjukkan bahwa pendanaan untuk program SDGs di Indonesia masih bergantung pada anggaran negara, sementara peran sektor swasta dan filantropi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan masih terbatas. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, serta sektor swasta sering kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan SDGs. Dalam konteks ini, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana model pendanaan alternatif dan mekanisme tata kelola yang lebih efektif dapat mendukung percepatan pencapaian SDGs di Indonesia.

Dampak perubahan iklim juga menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi SDGs, terutama dalam aspek keberlanjutan lingkungan (SDG 13, SDG 14, dan SDG 15). Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi risiko tinggi terkait bencana alam, degradasi lingkungan, serta perubahan ekosistem yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat (Sari & Wicaksono, 2020). Kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani permasalahan ini, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi strategi yang lebih inovatif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi SDGs di Indonesia berdasarkan literatur yang telah dipublikasikan? Kajian literatur menjadi penting untuk mengidentifikasi pencapaian, tantangan, serta strategi yang telah diterapkan dalam mencapai target SDGs. Melalui analisis sistematis terhadap penelitian yang telah ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk mengatasi hambatan yang ada serta mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, penelitian dan kebijakan yang berorientasi pada SDGs perlu terus

dikembangkan untuk memastikan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional sejak diadopsinya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Kebijakan ini mengamanatkan integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaannya dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasi SDGs di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Studi oleh Phasa dan Andriyus (2024) mengungkapkan bahwa di tingkat desa, seperti di Desa Pandau Jaya, implementasi SDGs terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan dana untuk melaksanakan program-program terkait. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam mencapai target SDGs di tingkat lokal. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius dalam implementasi SDGs di Indonesia. Penelitian oleh Usman et al. (2023) menyoroti bahwa meskipun terdapat komitmen kuat dari pemerintah, disparitas antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tetap tinggi. Hal ini diperburuk oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang menghambat upaya pencapaian tujuan SDGs terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kurangnya koordinasi dan integrasi kebijakan antar sektor dan tingkat pemerintahan juga menjadi permasalahan dalam implementasi SDGs. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengamanatkan integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah, namun studi oleh Usman et al. (2023) menunjukkan bahwa proses ini belum berjalan optimal. Keterbatasan dalam koordinasi antar lembaga dan kurangnya pemahaman yang seragam mengenai tujuan dan target SDGs menyebabkan implementasi yang tidak sinkron dan kurang efektif di berbagai daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia berdasarkan studi literatur yang tersedia. Sejak diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaannya masih diperlukan untuk memahami sejauh mana pencapaian SDGs telah berjalan serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasinya (Bappenas, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis berbagai studi literatur yang telah dipublikasikan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan SDGs. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan program yang mendukung pencapaian SDGs, beberapa indikator menunjukkan adanya ketimpangan dan kesenjangan antar daerah serta sektor pembangunan (Firdaus & Fauzi, 2021). Evaluasi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi SDGs, sekaligus menelaah hambatan utama yang masih dihadapi, seperti keterbatasan pendanaan, koordinasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta (Rahmawati & Setyowati, 2021). Dengan melakukan analisis berbasis literatur, penelitian ini akan mengungkap pola-pola yang muncul dalam implementasi SDGs di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan perspektif keberlanjutan terhadap implementasi SDGs di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian target dalam jangka pendek, tetapi juga bagaimana kebijakan dan strategi yang diterapkan dapat menjaga kesinambungan manfaatnya dalam jangka panjang (Sari & Wicaksono, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah apakah pendekatan yang digunakan dalam implementasi SDGs telah memperhitungkan aspek keberlanjutan, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Dengan memahami dinamika implementasi SDGs, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih adaptif dan inklusif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. SLR merupakan metode yang terstruktur dan transparan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Dewey & Drahota, 2016). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti dengan meminimalkan bias.

Proses SLR dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik terkait implementasi SDGs di Indonesia. Selanjutnya, strategi pencarian literatur disusun untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, termasuk jurnal terindeks, laporan kebijakan, dan publikasi akademik lainnya. Pencarian dilakukan melalui berbagai database ilmiah dan sumber literatur abu-abu untuk memastikan cakupan yang luas dan komprehensif (Okoli, 2015). Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, tahap berikutnya adalah seleksi dan penilaian kualitas studi. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan hanya studi yang memenuhi standar metodologis tertentu yang disertakan dalam analisis. Setiap studi dievaluasi secara kritis untuk menilai validitas, reliabilitas, dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian (Lame, 2019).

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan sintesis tematik. Analisis tematik adalah metode dalam penelitian kualitatif yang melibatkan identifikasi, analisis, dan interpretasi pola atau tema dalam data (Braun & Clarke, 2006). Dalam konteks SLR, sintesis tematik digunakan untuk mengorganisir temuan dari berbagai studi ke dalam tema-tema yang bermakna, sehingga memudahkan pemahaman mengenai aspek-aspek kunci dari implementasi SDGs di Indonesia. Melalui pendekatan SLR dan sintesis tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan, tantangan, dan perspektif keberlanjutan dalam implementasi SDGs di Indonesia. Hasilnya akan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber literatur yang mencakup jurnal terindeks, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Jurnal terindeks dipilih berdasarkan kualitas dan kredibilitasnya, terutama yang tersedia dalam database ilmiah seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA. Literatur yang berasal dari jurnal terindeks memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas akademik yang tinggi dan telah melalui proses peer review. Selain itu, laporan kebijakan dari lembaga pemerintah seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan untuk memahami kebijakan nasional dan implementasi SDGs di tingkat pemerintahan.

Selain jurnal terindeks dan laporan kebijakan, penelitian ini juga menggunakan publikasi akademik, seperti buku, prosiding konferensi, dan penelitian dari universitas atau lembaga riset. Publikasi akademik memberikan perspektif yang lebih luas terkait teori dan praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggabungkan berbagai sumber literatur, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif mengenai capaian, tantangan, serta strategi implementasi SDGs di Indonesia. Seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kebaruan, dan kredibilitas sumber guna memastikan bahwa kajian literatur yang digunakan memberikan gambaran yang akurat dan terkini.

Dalam menganalisis literatur yang telah dikumpulkan, penelitian ini menerapkan sintesis tematik sebagai teknik analisis utama. Sintesis tematik merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari berbagai studi terdahulu (Braun & Clarke, 2006). Teknik ini membantu dalam menyusun informasi secara sistematis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama, seperti kebijakan SDGs, implementasi di sektor tertentu, partisipasi pemangku kepentingan, serta tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap kesenjangan pengetahuan dan memberikan wawasan baru dalam implementasi SDGs di Indonesia.

Teknik sintesis tematik dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu (1) pengkodean data, (2) identifikasi tema, dan (3) interpretasi hasil. Dalam tahap pertama, setiap studi yang dianalisis dikodekan berdasarkan aspek yang relevan, seperti keberhasilan implementasi, tantangan, dan strategi keberlanjutan. Selanjutnya, hasil pengkodean tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih

luas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sistematis. Terakhir, hasil tematik yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi keberlanjutan SDGs di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Transparansi melalui E-Budgeting

Sejak diadopsinya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan 17 tujuan tersebut ke dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, telah menetapkan kerangka kerja nasional untuk pelaksanaan SDGs, yang mencakup rencana aksi nasional dan daerah. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mencapai target-target yang telah disepakati secara global.

Beberapa studi telah mengevaluasi capaian indikator SDGs di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Kanuna (2024) mengkaji implementasi SDGs di PT Triatra Sinergia Pratama Timika dan menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mengadopsi beberapa inisiatif berkelanjutan, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Selain itu, laporan oleh Badan Pusat Statistik (2018) memberikan gambaran awal tentang pencapaian berbagai indikator SDGs di Indonesia, menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa sektor, namun juga mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mendukung implementasi SDGs. Pembentukan Sekretariat Nasional SDGs di bawah koordinasi Bappenas bertujuan untuk mengoordinasikan upaya lintas sektor dan memastikan integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan pedoman untuk mendorong partisipasi aktif dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai target SDGs.

Peran Sektor Swasta dalam Implementasi SDGs

Sektor swasta di Indonesia juga memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Banyak perusahaan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi bisnis mereka. Misalnya, penelitian oleh Kanuna (2024) menunjukkan bahwa PT Triatra Sinergia Pratama Timika telah mengadopsi model bisnis yang selaras dengan tujuan SDGs, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta mulai menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs

Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci sukses dalam implementasi SDGs di Indonesia. Studi oleh Kanuna (2024) menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam berbagai program pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, program-program SDGs dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kesenjangan data untuk memantau kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, peningkatan kapasitas institusi, serta mobilisasi sumber daya yang memadai menjadi rekomendasi utama untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

Evaluasi Keberhasilan SDGs: Perbandingan Capaian Indonesia dengan Negara-Negara Asia Tenggara

Sejak diadopsinya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan. Evaluasi terhadap pencapaian ini penting dilakukan untuk mengukur kemajuan dan membandingkannya dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Perbandingan ini dapat memberikan perspektif mengenai posisi Indonesia dalam konteks regional serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan skor pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) antara Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya berdasarkan data dari Sustainable Development Report 2022:

Tabel 1. Perbandingan skor pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

NEGARA	SDGs SKOR
Thailand	74,13
Vietnam	72,76
Singapura	71,72
Malaysia	70,38
Indonesia	69,16

Sumber: Kompas.com

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat kelima di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal pencapaian SDGs, dengan skor 69,16. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, peringkat ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat sejajar atau melampaui negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

Berdasarkan Sustainable Development Report 2022, Indonesia memperoleh skor 69,16 dari skala 100 dalam pencapaian SDGs. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat kelima di Asia Tenggara, di bawah Thailand (74,13), Vietnam (72,76), Singapura (71,72), dan Malaysia (70,38). Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan sejak 2015, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat sejajar atau melampaui negara-negara tetangga. Pada tahun 2023, skor Indonesia meningkat menjadi 70,16, mempertahankan posisi di peringkat keempat di Asia Tenggara. Peningkatan skor ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan program nasional. Namun, peringkat yang relatif stagnan menunjukkan bahwa negara-negara lain di kawasan ini juga melakukan perbaikan yang signifikan, sehingga kompetisi dalam pencapaian SDGs tetap ketat.

Menariknya, laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2024 menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai 62,5% dari total target SDGs 2030, yang merupakan pencapaian tertinggi di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peringkat regional Indonesia berada di posisi menengah, dalam beberapa indikator tertentu, Indonesia mampu menunjukkan performa yang unggul dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Namun, tantangan masih ada. Beberapa tujuan SDGs di Indonesia, seperti pengentasan kelaparan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan, serta pelestarian ekosistem laut dan darat, masih memerlukan perhatian khusus. Pemerintah Indonesia telah mengakui perlunya upaya lebih kuat untuk meningkatkan pencapaian di area-area tersebut, termasuk melalui integrasi SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perbandingan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempercepat upaya dalam beberapa sektor untuk mengejar ketertinggalan. Misalnya, Thailand dan Vietnam telah menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam beberapa indikator SDGs. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga untuk mempercepat pencapaian SDGs secara keseluruhan.

Perspektif Keberlanjutan SDGs di Indonesia

Rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SDGs.

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak diadopsi pada tahun 2015. Namun, untuk mencapai target pada tahun 2030, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian SDGs melalui sinergi sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024).

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi "Tiga Mesin Ekonomi" untuk mempercepat pencapaian SDGs. Strategi ini mencakup revitalisasi ekonomi konvensional, pengembangan mesin ekonomi baru, dan penguatan ekonomi Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan SDGs (Indonesia.go.id, 2023). Pemerintah juga menekankan pentingnya memprioritaskan kebijakan dan investasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang merupakan kunci untuk mencapai berbagai tujuan SDGs. Selain

itu, peningkatan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat menjadi fokus utama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Kompas.com, 2024).

Di tingkat lokal, implementasi SDGs Desa menjadi strategi penting dalam mencapai target nasional. Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam program dana desa, pemerintah berharap dapat memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs secara nasional (Gemawan.org, 2021). Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasi SDGs di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program-program SDGs. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengimplementasikan program SDGs menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya (Phasa & Andriyus, 2024).

Peran inovasi, teknologi dan kolaborasi multi-stakeholder dalam mendukung keberlanjutan SDGs.

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana inovasi, teknologi, dan kolaborasi multi-stakeholder memainkan peran krusial. Inovasi teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Penggunaan teknologi tepat guna dapat mempercepat pencapaian SDGs dengan menyediakan solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat luas. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Melalui platform pembelajaran daring dan sumber daya digital, TIK memungkinkan penyebaran materi edukatif ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua. Selain itu, TIK juga memfasilitasi administrasi pendidikan yang lebih efisien, mendukung pengelolaan data dan informasi secara efektif.

Kolaborasi multi-stakeholder, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, menjadi kunci dalam implementasi SDGs di Indonesia. Kemitraan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, kolaborasi antara universitas dan sektor industri dapat menghasilkan inovasi teknologi yang relevan dan aplikatif, sementara keterlibatan masyarakat sipil memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya kemitraan multi-pihak dalam mencapai target SDGs. Melalui berbagai forum dan inisiatif, pemerintah mendorong dialog kebijakan dan komitmen bersama antara berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi antar sektor, tetapi juga memastikan bahwa upaya yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi global dengan negara lain dan organisasi internasional turut mempercepat pencapaian SDGs melalui berbagi praktik terbaik dan sumber daya.

Namun, tantangan dalam implementasi SDGs masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan kesenjangan teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas lokal melalui pelatihan dan transfer teknologi. Selain itu, penguatan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan. Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang tepat, Indonesia dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan berkelanjutan jangka panjang di Indonesia memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu implikasi kebijakan utama adalah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia dengan pendapatan per kapita antara US\$23.000 hingga US\$30.300 pada tahun 2045. RPJPN ini menekankan peningkatan kontribusi sektor manufaktur dan kemaritiman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 0,5-0,8% dan penurunan rasio gini menjadi 0,290-0,320. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan pembangunan harus berfokus pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur hijau, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan sektor-sektor ekonomi berbasis lingkungan. Selain itu, pengelolaan utang yang berkelanjutan menjadi krusial untuk memastikan stabilitas fiskal

jangka panjang, yang dapat dicapai melalui koordinasi kebijakan yang efektif dalam pembiayaan dan restrukturisasi utang. Transisi energi juga menjadi komponen vital dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menghentikan operasional semua pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam 15 tahun ke depan, menggantinya dengan lebih dari 75 gigawatt kapasitas energi terbarukan. Langkah ini bertujuan mencapai net-zero emissions pada tahun 2050. Namun, para ahli menekankan bahwa keberhasilan transisi ini memerlukan reformasi kebijakan yang signifikan, termasuk penghapusan subsidi batu bara dan peningkatan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan.

Dukungan finansial internasional juga memainkan peran penting dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman sebesar \$500 juta untuk mendukung upaya transisi energi Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan keberlanjutan finansial di sektor energi. Kolaborasi dengan mitra internasional ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapasitas energi terbarukan di Indonesia.

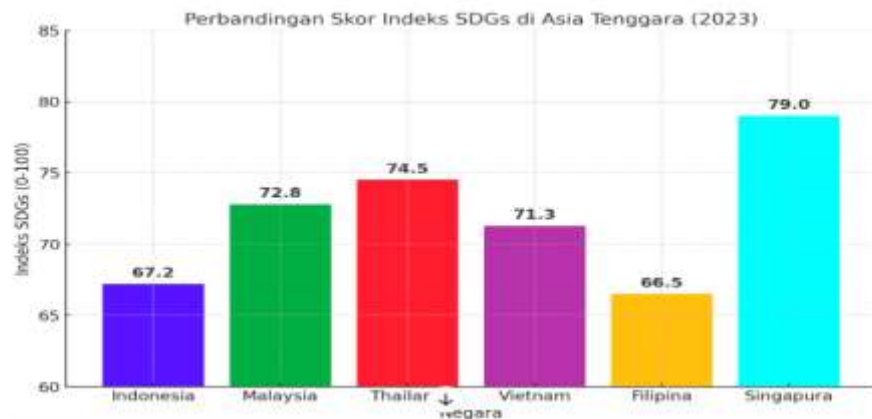
Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan masih signifikan. Ketergantungan Indonesia pada batu bara, terutama dalam sektor industri seperti pengolahan nikel, serta hambatan regulasi, menjadi penghalang utama dalam transisi menuju energi bersih. Selain itu, realisasi pendanaan dari komitmen internasional seringkali berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel perbandingan indikator utama capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara berdasarkan data terbaru dari sumber resmi seperti United Nations Sustainable Development Report (2023), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank.

Tabel 2. Perbandingan Capaian SDGs Indonesia dengan Negara Asia Tenggara (2023)

Indikator SDGs	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filifina	Singapura
Indeks SDGs (Skor 0-100)	67.2	72.8	74.5	71.3	66.5	79.0
Persentase Energi Terbaru (% dari total konsumsi)	12.4%	22.5%	20.3%	23.1%	14.8%	3.0%
Emisi CO ₂ per kapita (Ton/Kapita)	2.3	8.1	4.2	3.8	1.9	8.5
Tingkat Kemiskinan (<\$3.20/hari) (%)	9.6%	0.4%	0.2%	1.5%	12.5%	0.1%
Indeks gini (Ketimpangan Ekonomi)	38.2	41.0	37.9	34.8	42.3	45.8
Luas hutan yang dilindungi (% dari total lahan)	29.3%	18.5%	31.0%	42.6%	25.1%	2.3%
Peringkat SDGs Global (dari 166 negara)	76	63	61	65	82	47

Sumber: United Nations Sustainable Development Report (2023), World Bank, Asian Development Bank.

Grafik 1. Perbandingan Skor Indeks SDGs di Asia Tenggara (2023)

Grafik di atas menunjukkan perbandingan skor Indeks SDGs di Asia Tenggara pada tahun 2023. Singapura memiliki skor tertinggi (79.0), sedangkan Filipina memiliki skor terendah (66.5). Indonesia berada di peringkat menengah dengan skor 67.2, masih tertinggal dibandingkan Malaysia (72.8), Thailand (74.5), dan Vietnam (71.3).

Analisis:

- Singapura unggul dalam kebijakan keberlanjutan dan inovasi teknologi.
- Thailand dan Malaysia lebih baik dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
- Indonesia dan Filipina masih menghadapi tantangan besar dalam akses energi terbarukan dan ketimpangan sosial.

Diperlukan strategi lebih kuat untuk mempercepat pencapaian target SDGs di Indonesia, terutama dalam ketahanan energi, pemerataan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan tabel dan grafik perbandingan skor Indeks SDGs di Asia Tenggara tahun 2023, terlihat bahwa Singapura memiliki capaian tertinggi dengan skor 79.0, jauh melampaui negara-negara lain di kawasan ini. Keunggulan Singapura dapat dikaitkan dengan kebijakan lingkungan yang ketat, efisiensi energi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, Thailand dan Malaysia juga menunjukkan kinerja yang baik dengan skor masing-masing 74.5 dan 72.8, yang didorong oleh rendahnya tingkat kemiskinan, akses yang lebih baik terhadap energi terbarukan, serta sistem pemerintahan yang lebih stabil dalam mendukung kebijakan SDGs.

Di sisi lain, Indonesia dan Filipina masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target SDGs. Indonesia memperoleh skor 67.2, sedikit lebih baik dibandingkan Filipina dengan skor 66.5. Tantangan utama yang dihadapi kedua negara ini meliputi tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan dalam transisi ke energi bersih. Indonesia masih memiliki tingkat emisi karbon yang cukup tinggi dan ketergantungan yang besar terhadap energi fosil, sementara Filipina menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan ketahanan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia memiliki keunggulan dalam luas hutan yang dilindungi (29.3%), yang dapat menjadi peluang untuk pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Untuk mempercepat pencapaian SDGs, Indonesia perlu memperkuat kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada transisi energi hijau, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Keberhasilan negara-negara seperti Thailand dan Malaysia dalam implementasi SDGs dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, investasi dalam teknologi ramah lingkungan serta penguatan tata kelola pemerintahan akan menjadi kunci dalam meningkatkan skor Indeks SDGs Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Evaluasi capaian SDGs di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa indikator, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kebijakan lingkungan. Pemerintah telah mengadopsi berbagai strategi nasional untuk mendukung implementasi SDGs, termasuk integrasi ke dalam RPJMN dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Namun, capaian Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Thailand, yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat transisi ke energi bersih. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih adaptif dan berbasis data dalam pelaksanaan program SDGs di tingkat nasional maupun daerah.

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam implementasi SDGs meliputi ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung keberlanjutan. Banyak daerah yang masih mengalami kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih dan energi terbarukan. Selain itu, ketergantungan terhadap sumber daya alam sebagai pendorong ekonomi sering kali berbenturan dengan agenda keberlanjutan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih progresif untuk mengatasi konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk mengatasi tantangan ini secara lebih efektif. Potensi keberlanjutan SDGs di Indonesia dapat ditingkatkan melalui penguatan kolaborasi multi-stakeholder, pemanfaatan inovasi teknologi, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. Implementasi sistem pemantauan berbasis data, digitalisasi layanan publik, serta integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan dapat menjadi strategi utama dalam mempercepat pencapaian target SDGs. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan riset teknologi hijau akan menjadi faktor kunci dalam membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis inklusivitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai keberlanjutan SDGs secara lebih optimal pada tahun 2030.

SIMPULAN

Kajian literatur ini mengungkap bahwa implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan nasional untuk mendukung pencapaian SDGs, seperti integrasi target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Namun, kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di tingkat daerah masih menjadi kendala yang signifikan, terutama dalam hal pendanaan, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses implementasi.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki capaian SDGs yang masih tertinggal, dengan skor indeks 67.2, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini meliputi tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap energi terbarukan. Meskipun demikian, Indonesia memiliki keunggulan dalam luas hutan yang dilindungi, yang berpotensi menjadi modal utama dalam pengembangan kebijakan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi SDGs di Indonesia adalah kesenjangan dalam kapasitas pemerintah daerah, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pencapaian target SDGs antarwilayah. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan capaian SDGs yang lebih baik dibandingkan daerah lain, terutama yang memiliki dukungan infrastruktur, ekonomi, dan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat daerah sangat penting untuk memastikan implementasi SDGs yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain faktor kelembagaan, peran inovasi, teknologi, dan kolaborasi multi-stakeholder sangat diperlukan dalam mendukung keberlanjutan SDGs. Pemerintah perlu mendorong keterlibatan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam pengembangan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan SDGs. Pemanfaatan teknologi digital, seperti big data dan kecerdasan buatan (AI), dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan evaluasi capaian SDGs. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek keberlanjutan juga perlu diperkuat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi dalam kajian ini, Indonesia perlu memperkuat strategi implementasi SDGs dengan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan implementasi SDGs di Indonesia akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang berkelanjutan serta peningkatan investasi dalam program-program berbasis SDGs sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan secara optimal pada tahun 2030.

SARAN

Dalam rangka memperkuat implementasi SDGs di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan efektivitas kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Integrasi SDGs ke dalam kebijakan pembangunan harus diperkuat dengan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memiliki indikator capaian yang jelas dan berbasis data. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara transparan agar progres pencapaian SDGs dapat terukur dengan baik. Penyelarasan kebijakan lintas sektor, terutama dalam aspek ekonomi hijau, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi SDGs melalui pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan investasi dalam inovasi hijau. Perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian SDGs dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional mereka. Selain itu, kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah dalam bentuk public-private partnership (PPP) dapat mempercepat penyediaan infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Insentif fiskal bagi perusahaan yang berkontribusi terhadap SDGs juga perlu ditingkatkan untuk mendorong lebih banyak investasi berkelanjutan.

Dari sisi akademisi, penelitian dan inovasi berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Universitas dan lembaga penelitian perlu lebih aktif dalam melakukan kajian yang dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi antara akademisi dengan pemerintah dan sektor industri juga harus diperkuat untuk mengembangkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan SDGs, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Selain itu, kajian tentang dampak kebijakan SDGs secara jangka panjang juga perlu dikembangkan guna memastikan keberlanjutan program-program yang telah diterapkan.

Masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian SDGs melalui partisipasi aktif dalam pengawasan, advokasi kebijakan, dan penerapan gaya hidup berkelanjutan. Kesadaran publik terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan harus terus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye sosial. Masyarakat juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, mengurangi limbah plastik, serta mendukung produk dan layanan yang ramah lingkungan. Selain itu, peran komunitas dalam memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi di tingkat lokal juga perlu didorong untuk memastikan pencapaian SDGs yang lebih inklusif.

Untuk penelitian lebih lanjut, studi mendalam mengenai efektivitas kebijakan SDGs di berbagai sektor dan daerah di Indonesia perlu dilakukan. Analisis perbandingan implementasi SDGs antara Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya juga dapat memberikan wawasan baru dalam merancang strategi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian mengenai dampak digitalisasi dan teknologi inovatif terhadap percepatan pencapaian SDGs dapat menjadi topik yang sangat relevan dalam mendukung transisi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan yang lebih berbasis teknologi dan data. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis kolaborasi multi-stakeholder, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pencapaian target SDGs secara lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi SDGs tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, komitmen bersama dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan harus terus diperkuat agar Indonesia dapat mencapai target SDGs secara optimal pada tahun 2030.

REFERENSI

- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Sustainable Development Goals Indicators Baseline Report 2021*. ASEAN.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2021). *Laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tahun 2021*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2022). *Laporan voluntary national review (VNR) Indonesia 2022: Perkembangan implementasi SDGs di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in*

- Psychology, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Dewey, A., & Drahota, A. (2016). Introduction to systematic reviews: Online learning module Cochrane Training.
- Firdaus, M., & Fauzi, A. (2021). Implementasi SDGs di Indonesia: Capaian dan tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 112-130.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, November 6). Indonesia capai 62,5 persen target SDGs 2030, tertinggi di Asia.
- Kanuna, M. W. S. (2024). Analisis implementasi SDGs (Sustainable Development Goals): Fenomena berkelanjutan pada perusahaan PT Triatra Sinergia Pratama Timika. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 6(2), 31-45.
- Kharrazi, A., Kraines, S., Yu, Y., & Hoekstra, A. Y. (2021). Exploring the efficiency of sustainable development goals using network analysis. *Sustainability Science*, 16(2), 413-428.
- Kompas.com. (2023, Mei 1). Indonesia peringkat 5 pencapaian SDGs kawasan Asia Tenggara.
- Kompas.com. (2023, Oktober 25). Indonesia peringkat 4 pencapaian SDGs kawasan Asia Tenggara 2023.
- Kumparan.com. (2023, September 20). Menlu Retno di PBB: Pencapaian SDGs Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia.
- Lame, G. (2019). Systematic literature reviews: An introduction.
- Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(43), 879-910.
- Phasa, N. P., & Andriyus. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pandau Jaya. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 1(3), 409-420.
- Prasetyo, R., & Yuliati, N. (2022). Ketimpangan pembangunan dan pencapaian SDGs di Indonesia: Analisis regional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 7(3), 221-235.
- Purwanto, A., Sudarmanto, H., & Setiawan, I. (2022). The role of digital transformation in achieving sustainable development goals in Indonesia. *Journal of Sustainability Studies*, 5(2), 45-60.
- Rahmawati, S., & Setyowati, H. (2021). Peran pendanaan dalam implementasi SDGs di Indonesia: Studi tentang keterlibatan sektor swasta. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(4), 65-80.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2022). Sustainable development report 2022: Tracking progress on the SDGs. Cambridge University Press.
- Sari, I. P., & Wicaksono, A. (2020). Perubahan iklim dan keberlanjutan SDGs: Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 8(2), 98-113.
- SDGs Center Universitas Padjadjaran. (2020). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target, dan strategi implementasi.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. UN General Assembly.
- United Nations. (2022). Voluntary national review (VNR) 2022: Indonesia's progress on SDGs implementation. UN Department of Economic and Social Affairs.
- UNDP Indonesia. (2021). COVID-19 and SDGs in Indonesia: Impact and policy responses. United Nations Development Programme Indonesia.
- Wijaya, A., & Glasbergen, P. (2021). Multi-stakeholder partnerships for achieving SDGs in Indonesia: A governance perspective. *Sustainable Development*, 29(3), 487-500.